

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH LANGSUNG DALAM KERANGKA OTONOMI  
KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

TESIS

Nama : Titi Anggraini  
NPM : 0603001346



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
Agustus 2005**

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH LANGSUNG DALAM KERANGKA OTONOMI  
KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Nama : Titi Anggraini  
NPM : 0603001346



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
Agustus 2005**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Titi Anggraini  
NPM : 0603001346

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Agustus 2005

Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia

Tanda Persetujuan Tesis

Nama: Titi Anggraini

NPM: 6503001346

Program Kekhususan: Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat

Judul Tesis:

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
LANGSUNG DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menyetujui,

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, MH.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titi Anggraini  
NPM : 0603001364  
Program Studi : Pascasarjana  
Departemen : Kekhususan Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH LANGSUNG DALAM KERANGKA OTONOMI  
KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Agustus 2005

Yang menyatakan,

(Titi Anggraini)

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Syukur dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas karunia-Nya tesis ini dapat tersusun untuk memenuhi prasyarat sebagai Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam tesis ini penulis berusaha untuk mengetahui: (1) bagaimana kerangka hukum pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kaitan dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (2) bagaimana proses, mekanisme, dan bentuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam kerangka otonomi khusus sebagaimana diamndatkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan (3) apa saja persoalan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat penerapan otonomi khusus sesuai UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi akademisi dan praktisi hukum, mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, utamanya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, MH., yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini. Dukungan dan tantangan yang beliau berikan terhadap topik penelitian ini pada awal penulisan, sangat besar artinya bagi penulis.

Semangat dan profesionalitas beliau pada saat mengajar di program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat, telah pula menginspirasi penulis untuk memilih topik penelitian ini. Penulis sangat berharap kelak dapat mengikuti jejak langkah Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, MH., dalam berkiprah di dunia hukum ketatanegaraan Indonesia. Amin!

2. Dr. Satya Arinanto, SH, MH., sebagai penguji pada sidang untuk mempertahankan tesis ini. Kritik dan saran beliau mengenai kerangka hukum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah menyempurnakan penulisan tesis ini. Selain itu, kontribusi beliau semenjak penulis menempuh pendidikan di Strata I Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sungguh merupakan bekal yang luar biasa dalam perjalanan keilmuan penulis.
3. Winarno Yudho, S.H., M.H., sebagai penguji pada sidang untuk mempertahankan tesis ini. Kesediaan beliau untuk menguji penulis di sela-sela kesibukannya yang luar biasa di Mahkamah Konstitusi, sungguh merupakan penghargaan dan penghormatan bagi Penulis. Penulis akan menjadikan seluruh atensi dan kontribusi beliau sebagai cambuk untuk terus berkarya memberikan kontribusi dalam ranah pembangunan hukum tata negara di Indonesia.
4. Rusmala Dewi Saman, Ibu yang doa, ridho dan keikhlasannya telah mengantarkan penulis pada setiap pencapaian dalam hidup.
5. Dialmi Ma'roef, Ayah yang selalu membuka kesempatan dan kemudahan untuk penulis dalam meraih segala impian dan cita-cita.
6. Fera Kirana dan Desi Ariyani, adik-adik yang telah membantu dan selalu memberikan dukungannya.
7. Mashudi SR., yang telah menjadi sahabat, partner dan kompetitor dalam hidup penulis. Terutama untuk dukungan dan bantuannya yang penuh ketulusan, dan keyakinan bahwa penulis bisa mencapai semua hal yang dicita-citakan.

8. Teman-teman Kelas A (Reguler) pada Program Pascasarjana Kekhususan Hukum tentang Hubungan Negara dan Masyarakat Universitas Indonesia, atas semangat dan dukungannya yang tak pernah henti.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan karya ini. Atas doa, dukungan, dan bantuannya yang tak pernah henti agar penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirul kalam, penulis mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan dan pembangunan hukum tata negara di Republik Indonesia.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 5 Agustus 2005

Penulis

Titi Anggraini

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kerangka Konsepsional .....	23
E. Metode Penelitian .....	26
F. Sistematika Penelitian .....	27
<b>BAB II PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA</b>	
A. KERANGKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA .....	16
B. REZIM PEMILIHAN UMUM VERSUS REZIM PEMERINTAHAN DAERAH .....	38
C. SENGKETA PENETAPAN HASIL PILKADA .....	53
<b>BAB III PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	
A. LANDASAN HUKUM .....	57
B. PENYELENGGARA PEMILIHAN .....	108
C. PENGAWASAN PEMILIHAN .....	112
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	114
B. SARAN .....	115
 Daftar Pustaka .....	 118

## LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Lampiran I : Perbandingan Umum antara Draf Rancangan Qanun usulan CETRO, usulan IRI, usulan Tim Inisiator DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004
- Lampiran II : Perbandingan Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam
- Lampiran III : Perbandingan antara Qanun Provinsi NAD No. 2 Tahun 2004 dan Rancangan Perubahan atas Qanun Provinsi NAD No. 2 Tahun 2004 (Hasil Kerja BPK DPRD Prov. NAD)
- Lampiran IV : Perbandingan Qanun Pilkada NAD Versi Qanun No. 2 Tahun 04, Revisi Qanun Nomor 2 Tahun 2004 oleh DPRD, dan Hasil Koreksi Mendagri Tahun 2005
- Lampiran V : Qanun Nomor 2 Tahun 2004
- Lampiran VI : Qanun Nomor 3 Tahun 2005